

# PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PENERBANGAN DI SURABAYA

Oleh  
SULFI AYU ROHMAWATI  
14310766

STIE MAHARDHIKA

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Penerbangan Di Surabaya, Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian penumpang sebanyak 75 responden, dengan pengumpulan data berupa kuisioner kemudian dilakukan olah data dengan bantuan SPSS for windows dengan serangkaian analisis regresi liner berganda sehingga menghasilkan persamaan dan uji hipotesis sebagai berikut :

Dari hasil persamaan regresi diatas menjelaskan bahwa nilai positif pada tiap tiap variabel menunjukkan bahwa tiap peningkatan variabel bebas independensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran akan meningkatkan kinerja perusahaan secara positif, kemudian hasil uji hipotesis dengan uji T pada variabel independensi memperoleh nilai t hitung sebesar 2.958. Karena nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $2.958 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.042 \leq \alpha 0.05$ ), Artinya variabel Independensi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hipotesis pertama diterima, kemudian pada variabel transparansi nilai t hitung sebesar 4.052. t hitung  $\geq$  t tabel ( $4.052 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.000 \leq \alpha 0.05$ ), Artinya variabel transparansi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hipotesis kedua diterima, variabel akuntabilitas memperoleh nilai t hitung sebesar 2.121, nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $2.121 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.004 \leq 0.05$ ), Artinya variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. hipotesis ketiga diterima, variabel pertanggung jawaban nilai t hitung sebesar 2.439, nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $2.439 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.005 \leq 0.05$ ), Artinya variabel pertanggung jawaban berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. hipotesis keempat diterima, variabel kewajaran memperoleh nilai t hitung sebesar 3.424. Karena nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $3,424 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.001 \leq 0.05$ ), Artinya variabel kewajaran berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. hipotesis kelima diterima.

**Kata Kunci : *Independensi, Independensi, Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban, Kewajaran Dan Kinerja Perusahaan***

### Latar Belakang Masalah

Angkutan udara merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena terasa lebih nyaman serta menghemat waktu, maka dalam hal ini persaingan dalam dunia penerbangan semakin ketat dikutip dari sumber laman bisnis news.id sejumlah analis penerbangan di tanah air memperkirakan jumlah penumpang udara di Indonesia (domestik) tahun 2019 tembus 100 juta penumpang per tahun Sebagai gambaran dengan beberapa negara tetangga kita, seperti Singapura dengan jumlah penduduk hanya sekitar 5 juta jiwa, bisa mendapatkan jumlah penumpangnya 10 juta per tahun, Malaysia penduduk 20 juta jiwa, Amerika 300 jutaan mempunyai armada pesawat

komersial 3000 pesawat, Australia dengan jumlah penduduk 23 juta jumlah penumpang yang diangkut per tahun mencapai 71 juta.

Ratio antara jumlah penumpang dengan seringnya penduduk terbang, minimal rata-rata dua kali, maka idealnya Indonesia jumlah pesawat yang tersedia mencapai 2000 unit dengan jumlah penumpang setahun mencapai 500 juta. Terlebih negara kita (Indonesia) adalah negara kepulauan yang memerlukan mobilitas dengan kecepatan di era modern saat ini. Jadi memang potensi penumpang udara kita masih sangat besar untuk terus berkembang lagi di masa yang akan datang.

Dari peluang yang ada untuk menghadapinya maka tiap perusahaan

haruslah memerlukan Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance – GCG*) merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan untuk bertumbuh dan berkembang di seluruh dunia. Tata kelola perusahaan yang baik, yaitu hasil dari perencanaan yang matang, implementasi, koordinasi, dan evaluasi. Tata kelola perusahaan yang baik ditentukan berdasarkan standar penilaian yang dikembangkan oleh Deminor International, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Brussel, bekerja sama dengan memimpin investor institusi dan juga memperhatikan kode pemerintahan nasional, perusahaan yang sehat dan memiliki tata kelola yang baik akan memudahkan untuk membaca kualitas kinerja perusahaan yang merupakan salah satu ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dalam perusahaan. *Corporate Governance* yang terjadi ketika adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik (principal) dengan pengendalian perusahaan oleh manajer (agent) cenderung menimbulkan adanya konflik keagenan diantara keduanya. Jika suatu perusahaan sudah menerapkan *Corporate Governance* dengan baik, maka diharapkan telah menerapkan prinsip-prinsip dari *corporate governance* seperti transparansi dan akuntabilitas. Suatu keberhasilan dari adanya penerapan prinsip GCG adalah perusahaan memiliki suatu pengelolaan (*governance*) yang baik, sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan, serta dikendalikan

Ukuran kinerja perusahaan yang baik diawali dengan adanya kepercayaan dari investor terhadap suatu perusahaan bahwa dana yang mereka investasikan dalam kondisi yang aman dan diharapkan akan memberikan dampak yang baik pula. Jika suatu perusahaan memiliki kepercayaan dari investor, maka para investor dan pemegang saham lainnya tidak akan ragu untuk melakukan investasi yang akan menyebabkan nilai perusahaan akan meningkat. Pengukuran suatu kinerja perusahaan yang baik maupun buruk dapat dilihat dari peningkatan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap

kinerja suatu perusahaan di masa lampau, serta prospeknya di masa yang akan datang. Kinerja perusahaan yang buruk dikarenakan tidak tercapainya efisiensi pasar sehingga peluang bisnis banyak yang hilang, sedangkan masalah keuangan pada perusahaan tersebut akan menyebar dengan sangat cepat ke perusahaan lain, karyawan, kreditor, pemerintah, konsumen, maupun pemegang saham lainnya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2017) yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, karena semakin besar jumlah dalam anggota dewan direksi dapat menimbulkan semakin banyak konflik, namun jumlah tersebut dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin beragam pada anggota dewan direksi. (2) Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, karena dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris, maka pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik. (3) Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena keberadaan komisaris independen dalam perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi saja. (4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, mengacu pada penelitian ini para pemegang saham mengharapkan manajemen perusahaan bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan dan setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan para pemegang sahamnya serta sumber ekonomi yang digunakan untuk kepentingan pertumbuhan nilai perusahaan, tetapi seringkali manajemen sebagai pihak pengelola perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan dalam melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan ukuran kinerja

perusahaan sebagaimana manfaat kinerja perusahaan dalam perusahaan itu sendiri akan menghasilkan data, dan data yang telah dianalisis kemudian memberikan informasi yang berguna bagi peningkatan pengetahuan para manajer dalam mengambil keputusan atau tindakan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu perlindungan untuk berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Sehubungan dengan latar belakang masalah yang ada maka peneliti tertarik meneliti penelitian yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Di Perusahaan Penerbangan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah pertanggung jawaban berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

### Landasan Teori

#### Industri jasa angkutan udara

Angkutan udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 yang dikutip oleh yowanda, dkk (2017:169) adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke

bandara yang lain atau beberapa bandara. (Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara.) Menurut Rustian Kamaluddin (2003:3) dalam yowanda, dkk (2017), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Unsur – unsur transportasi meliputi : manusia yang membutuhkan, barang yang dibutuhkan, kendaraan sebagai alat/sarana, jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi, organisasi (pengelola transportasi) Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industriisasi.

### Pengorganisasian Angkutan Udara

Menurut Nasution (2004:271) dikutip oleh yowanda, dkk (2017) menyatakan bahwa dalam mengorganisasikan operasi penerbangan untuk mencapai fungsi jasa angkutan udara, harus ditentukan tingkat pelayanan pada penumpang, standart keuangan dan biaya, persediaan, dan penjualan tiket.

1) Pelayanan Penumpang : dalam merancang proses pelayanan jasa penerbangan didasarkan pada kerangka kerja merupakan segitiga jasa, dimana terdapat empat elemen yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi jasa, yaitu pelanggan, manusia, strategi, dan sistem.2) Standart Keuangan dan Biaya :keuangan dan biaya perusahaan penerbangan menurut penelitian di Amerika, sebagian modal perusahaan (70%) terdiri atas saham-saham dan sisanya pinjaman jangka panjang. Dana yang diperlukan bagi modal kerjanya berasal dari penyusutan dan keuntungan. 3) Persediaan Logistik : proses penyelenggaraan logistic penerbangan adalah suatu rangkaian tindakan atas kegiatan menurut aturan yang tetap dan teratur, yaitu pemesanan, penerimaan, pengoprasian, dan penyaluran untuk dipakai. 4) Penjualan Tiket dan Reservasi : target perusahaan adalah mendapatkan muatan sebanyak mungkin baik melalui sistem online maupun tidak untuk mencapai *tumover* sebesar mungkin dan menambah pendapatan penyeimbang dengan menjual tiket penerbangan asing.

## **Teori Keagenan (Agency Teori)**

*Agency relationship* veno (2015) didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut *owners* atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (*utility maximizers*), cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki *welfare motives* yang bersifat jangka panjang, sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang mereka cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji.

Dengan adanya monitoring cost tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek akan berbeda dengan keinginan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976) Dalam veno (2015).

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati, dkk, 2005) dalam veno (2015) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. 1) Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko. 2) Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara principal dan agent. 3) Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap

sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan *Corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004) dalam veno (2015)

## **Good Corporate Governance (GCG)**

Adapun beberapa pengertian dari para ahli dan lembaga tentang *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu: Menurut Sutedi (2012), *good corporate governance* merupakan :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Menurut Daniri (2014), *good corporate governance* merupakan :

“Struktur dan proses (Peraturan, Sistem dan Prosedur) untuk memastikan Prinsip TARIF bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

## **Manfaat Corporate Governance**

FCGI (2001) dalam Rofina (2013:3) mengungkapkan bahwa *corporate governance* memiliki banyak manfaat bagi perusahaan antara lain :

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan, Keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, mempermudah dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan Corporate Value, Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders's value dan deviden. Khususnya bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi, tujuan dari good corporate governance (GCG) adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), secara teoritis pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka.

### **Prinsip – Prinsip Dasar Good Corporate Governance**

Effendi (2009) dalam Rofina (2013) dalam mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*) serta kewajaran (*faimess*) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas komite audit akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut :

1) prinsip independensi, yaitu komite audit diharapkan bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan kepentingan. Oleh karena itu nama-nama anggota komite audit (terutama di perusahaan publik) hendaknya diumumkan ke masyarakat atau publik

sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independensi mereka, prinsip independensi berpedoman pada dua poin dalam asmorojati (2016), menghindari dominasi, tekanan dari pihak tertentu serta bebas dari benturan kepentingan, pengungkapan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. 2) prinsip transparansi, hal ini ditunjukkan melalui piagam komite audit (*audit committee charter*), program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang di dokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan (*disclosure*). Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang dipublikasikan kepada publik, pengukuran transparansi berpedoman dalam asmorojati (2016) Pengungkapan Informasi secara tepat waktu, memadai, dan akurat, kepada publik dan akses oleh stakeholders, Pengkomunikasian kebijakan kepada stakeholders, Penyampaian laporan Pelaksanaan GCG kepada stakeholders, Penyampaian informasi pelayanan kepada pelanggan dan pemeliharaan, kerahasiaan informasi, 3) prinsip akuntabilitas, hal ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompetensi dan pengalaman dibidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional penerapan akuntabilitas berpedoman dalam asmorojati (2016) penetapan tanggung jawab karyawan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan, mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan gcg, memiliki ukuran kinerja dan sistem reward and punishment, memegang prinsip gcg dan etika bisnis perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya. 4) Prinsip Pertanggung jawaban, prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada publik, selain pada dewan komisaris prinsip pertanggung jawaban

berpedoman pada dua poin dalam asmorajati (2016) berpegang pada prinsip kehati-hatian prudential practices dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, pelaksanaan tanggung jawab sosial. 5) prinsip kewajaran, prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil (*fair*) dan objektif terhadap semua pihak. Berpedoman pada dua poin menurut asmorajati (2016) perlakuan setara kepada seluruh stakeholders, kesempatan yang sama bagi seluruh stakeholders untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi kepentingan perusahaan.

Sedangkan menurut sutedi (2013:11) Adapun beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance*, yaitu sebagai berikut : 1) *Transparansi* (Keterbukaan) : perusahaan harus memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan, ini semua untuk mengurangi kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*creative accounting*) atau manajemen laba (*earnings management*), pengakuan pajak yang salah, dan penerapan dari prinsip prinsip pelaporan yang cacat. 2) Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*) : setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan perusahaan itu harus dilaporkan atau harus diketahui oleh *stakeholders*, itu semua adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada *stakeholders*. Apalagi, bila dalam perusahaan tersebut terjadi kesalahan seperti integritas manajemen yang rendah, etika bisnis yang buruk, dan aturan kekuatan daripada aturan hukum. 3) Kejujuran (*Fairness*) : Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Sehingga, perusahaan ditekankan harus memiliki kejujuran terhadap *stakeholders*. 4) *Sustainability* (kelanjutan) : ketika perusahaan dapat berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya

agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi warga corporate yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*.

### **Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal**

*Internal corporate governance* mempunyai efek langsung guna mendorong manajer untuk meningkatkan kinerja (Faisal, 2005) dalam veno (2015:99). *Internal corporate governance* dibedakan menurut fokus pengendaliannya yakni *internal corporate governance*-manajer (ICG-manajer) dan *internal corporate governance*-pemilik (ICG-pemilik), ICGmanajer menekankan pada pengendalian dalam diri manajer yang distimuli secara internal (melalui perhatian pemilik terhadap kepentingan manajer) agar manajer meningkatkan kinerja terutama dalam hal pendapatan bank (*revenue*). Sedangkan ICG-pemilik menekankan pada pengendalian manajer (melalui pihak lain) agar manajer meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, kombinasi dari dua bentuk ICG ini cenderung superior dalam menjelaskan kemampuan *good corporate governance* dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, pemantauan terhadap terselenggaranya sistem pengendalian intern dalam rangka mewujudkan *good corporate governance* dipengaruhi oleh beberapa-beberapa faktor:

Ukuran Dewan Direksi : dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal bank, direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian intern; melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris; memelihara suatu struktur organisasi; memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Untuk memantau serta memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif,

direksi melakukan langkah-langkah, antara lain :

Menugaskan para manajer/pejabat dan staf yang bertanggung jawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi, Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer/pejabat dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan; Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi perusahaan, Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer/pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai

Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan atau auditorekstern, antara lain dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja bank karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Pfefer, 1973; Pearce & Zahra, 1992 dalam veno (2015)

Dewan Komisaris : Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer. Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta BEJ Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 dalam veno (2015:100) mengharuskan perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk memiliki dewan komisaris yang memonitor perusahaan agar tercipta *Good Corporate Governance* di Indonesia. Secara hukum dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Dalam melakukan pemantauan terhadap direksi, dewan

komisaris memastikan bahwa direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengawasi dipenuhinya kepentingan semua stakeholders berdasarkan azas kesetaraan, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan auditor dilakukan oleh manajemen puncak, kebebasan auditor terlihat berkurang dipandang dari sudut pemegang saham, dalam hal ini adalah dewan komisaris. Seperti yang di kemukakan oleh Mulyadi (2002) mengenai dewan komisaris yaitu: "Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, Dewan Komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi).

Komite Audit : pembentukan komite audit oleh perusahaan-perusahaan publik sudah banyak dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Seiring dengan menguatnya tuntutan agar perusahaan lebih transparan dan reliable mengenai kinerjanya, peran komite audit menjadi semakin penting. Berikut pengertian komite audit dari beberapa ahli:

Menurut Bapepam No. Kep-29/M/2004 yang dikutip oleh m veno (2015), menjelaskan pengertian komite audit sebagai berikut : "Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya".

Menurut Ikatan Komite Audit yang di kutip oleh veno (2015), menjelaskan definisi Komite Audit sebagai berikut : "Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan (pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan

audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan”.

Meskipun pendapat mengenai definisi komite audit menurut beberapa ahli berbeda-beda tetapi memiliki maksud yang sama yaitu komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya

### **Unsur-Unsur Corporate Governance**

Perusahaan harus memiliki sesuatu hal yang dapat menjamin berfungsinya *good corporate governance* salah satunya ialah unsur-unsur *corporate governance* baik yang berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan, unsur-unsur tersebut ialah (Sutedi, 2013):

**Corporate Governance-Internal Perusahaan :** Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan dinamakan *Corporate Governance Internal Perusahaan*. Unsur-unsur dari dalam perusahaan adalah: Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Manajer, Karyawan/Serikat Pekerja, Sistem Remunirasi berdasarkan Kinerja Komite Audit, Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain: keterbukaan dan kerahasiaan, transparansi, akuntabilitas, kejujuran, aturan dari *code of conduct* .

**Corporate governance-eksternal** perusahaan unsur yang berasal dari luar perusahaan dinamakan *corporate governance-eksternal* perusahaan.

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah: kecukupan uu dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik , nstitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi: aturan dari *code of conduct*, kejujuran, akuntabilitas, jaminan hukum Perilaku partisipasi pelaku *corporate governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur tersebut (*internal* dan *eksternal*) menentukan kualitas *corporate governance*.

### **Cakupan atau Lingkup Good Corporate Governance**

*Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta good corporate governance dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut: Kerangka kerja *corporate governance* harus mendorong dan melindungi pemegang saham, dengan memberikan: Metode yang aman dalam pendaftaran kepemilikan, melakukan transfer efek, mendapat informasi perusahaan, partisipasi dalam RUPS, memilih *broad of directors*, dan mendapat *dividen*, Hak untuk berpartisipasi mengenai keputusan perubahan perusahaan yang bersifat fundamental, misalnya perubahan anggaran dasar, penambahan modal, merger, dan penjualan aset perusahaan dalam jumlah yang besar. Hak dan tanggung jawab *stakeholders*, Kerangka kerja *corporate governance* harus memberi kepastian bahwa hak *stakeholders* dan publik dilindungi oleh UU dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, lapangan kerja serta kemampuan keuangan perusahaan yang memadai, Perlakuan yang wajar terhadap pemegang saham, Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan perlakuan yang wajar terhadap semua pemegang saham minoritas dan asing. Pemegang saham yang mempunyai klasifikasi yang sama mendapatkan perlakuan yang sama. Pemegang saham harus dilindungi dari penipuan, self dealing, dan insider trading yang dilakukan oleh board of directors, manajer, dan pemegang saham utama, atau pihak lain yang mempunyai akses informasi perusahaan. Keterbukaan dan Transparansi Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan diungkapkannya informasi materiil perusahaan yang akurat dan tepat waktu, antara lain meliputi situasi keuangan, kinerja perusahaan, pemegang saham, dan manajemen perusahaan serta faktor risiko yang mungkin timbul. Informasi material yang perlu diungkapkan meliputi antara lain hasil keuangan dan usaha perusahaan, pemegang saham utama,

anggota *board of directors* dan eksekutif, resiko yang mungkin dihadapi, struktur dan kebijakan perusahaan serta target yang ingin dicapai, Wewenang dan tanggung jawab *Board of Directors*, *Board of Directors* harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara efektif dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Anggota *Board of Directors* harus bertindak secara transparan, iktikad baik dan telah melakukan *due diligent* serta dalam cara yang menurut pandangannya adalah hal yang terbaik bagi perusahaan. *Board of Directors* bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan saham pendiri dan memastikan perusahaan melakukan kegiatannya.

### **Penilaian Good Corporate Governance**

Penilaian dari corporate governance ialah pengawasan dari komisaris independen, kepemilikan institusional, dan dewan direksi (Sutedi, 2013). Adapun penjelasan dari setiap indikator tersebut ialah: 1) Komisaris Independen Menurut Emirzon (2006) komisaris merupakan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan yang di pimpin oleh dewan direksi. Pembentukan komisaris independen didasarkan oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT terbuka. Anggota dari komisaris independen tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi ataupun para pemegang saham yang kuat karena komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. 2) Dewan Direksi Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi juga merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan corporate governance yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi umumnya berhubungan dengan implikasi dan kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direksi yang bertugas sebagai pengendali internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan

(Hermalin dan Weisbach, 1991). 3) Kepemilikan Institusional Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi, seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dan institusi lainnya (Gideon, 2005). Menurut Widjaja dan Kasenda (2008) tingkat kepentingan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost*.

### **Kinerja perusahaan**

Kinerja perusahaan menurut binangkit (2014) merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan sehingga perlu mendapat perhatian sama seperti risiko yang terdapat dalam operasional, strategis, dan masalah keuangan. Kinerja yang baik merupakan aset bagi perusahaan sebaliknya, kinerja yang buruk adalah beban bagi perusahaan. Sebagai aset strategis dari perusahaan, kinerja memainkan peranan dalam mencapai keunggulan bersaing dan meningkatkan nilai usaha. Jika kinerja dianggap beban bagi perusahaan, maka tujuan perusahaan adalah mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari kinerja tersebut. Kinerja perusahaan merupakan hal yang dianggap penting bagi keberlangsungan perusahaan, kinerja dapat menjelaskan mengapa pelanggan lebih memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan daripada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing, yang membedakannya antara kegagalan atau kesuksesan. Semakin kredibel kelompok akreditasi, maka perusahaan akan semakin percaya diri untuk mempertahankan dirinya sendiri menghadapi klaim *eksternal* dan publikasi yang negatif.

Kinerja perusahaan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan *non financial* yang didasarkan dalam teori yang dikemukakan nazarudin (2013) kinerja perusahaan non financial adalah upaya perusahaan Mengelola operasi

perusahaan secara efektif dan efisien melalui pemberian motivasi secara maksimal kepada para karyawan, bertujuan agar karyawan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga segala aktivitas tetap berada pada jalur kehendak perusahaan

Pengukuran kinerja sebuah perusahaan penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan baik atau buruk. Pengukuran kinerja perusahaan di dalam berbagai penelitian dapat diukur dengan kinerja operasi perusahaan dan kinerja pasar. Pengukuran kinerja operasi perusahaan dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan yang terlihat pada laporan keuangannya lestari (2013).

### **Tujuan Penilaian Kinerja**

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Vincent Gaspersz, 2013)

### **Manfaat Pengukuran Kinerja**

Suatu pengukuran kinerja akan menghasilkan data, dan data yang telah dianalisis akan memberikan informasi yang berguna bagi peningkatan pengetahuan para manajer dalam mengambil keputusan atau tindakan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi (Vincent 2013). Manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah: 1) Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. 2) Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 3) Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (*reduction of waste*). 4) Membuat

suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 5) Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberireward atas perilaku yang diharapkan itu.

### **Manfaat Penilaian Kinerja**

Manfaat dari penilaian kinerja bagi manajemen perusahaan adalah sebagai berikut: Mulyadi (2013). 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian, 2) Karyawan secara maksimum, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan, karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan, penghargaan digolongkan dalam dua (2) kelompok, yaitu: 1) Penghargaan intrinsik, berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan berbagai teknik seperti pengayaan pekerjaan, penambahan tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan. 2) Penghargaan ekstrinsik, terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan, baik yang berupa kompensasi langsung (gaji, honorarium lembur dan hari lembur, pembagian laba, pembagian saham, dan bonus), kompensasi tidak langsung (asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium liburan, dan tunjangan masa sakit), dan kompensasi non keuangan (ruang kerja yang memiliki lokasi istimewa, peralatan kantor yang istimewa, dan tempat parkir luas), dimana ketiganya memerlukan data kinerja karyawan agar penghargaan tersebut dirasakan adil oleh karyawan yang menerima penghargaan tersebut.

### **penilaian kinerja perusahaan**

Menurut mulyadi (2013) penilaian kinerja adalah :penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk : 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian, 2) mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

### **Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Alasan menggunakan pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran umum yang lebih objektif dan terukur. Dalam penelitian ini tidak ada perlakuan khusus pada responden karena itu diteliti apa adanya. Karena terdapat masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini apakah *independent* terhadap variabel terikatnya .

### **Populasi Dan Sampel**

#### **Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2015), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah penumpang atau pelanggan yang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Juanda Surabaya. Akan tetapi jumlah dari populasi ini tidak diketahui karena terbatasnya waktu maka penelitian ini dilakukan secara sampling.

### **Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel.

Menurut Sugiyono (2015), sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid disekolah tertentu dan sebagainya. Sedangkan Sampel menurut Sunyoto (2013), merupakan sub kelompok elemen populasi yang karakteristiknya hendak diseleksi dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan sampel adalah : Menemui responden yang merupakan pelanggan yang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Juanda Surabaya dengan menjelaskan dan mengarahkan responden tentang cara pengisian kuesioner, responden memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tertulis pada lembar kuesioner.

### **Definisi operasional variabel**

Menurut Sugiyono (2013) mendefinisikan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen (Variabel bebas) adalah :

A. Variabel bebas ditandai dengan symbol (X)

1. Independensi (X1)

Yaitu komite audit diharapkan bersikap independen terhadap

kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan kepentingan. Oleh karena itu nama-nama anggota komite audit (terutama di perusahaan publik) hendaknya diumumkan ke masyarakat atau publik sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independensi mereka.

Prinsip independensi berpedoman pada dua poin dalam asmorjati (2016), menghindari dominasi, tekanan dari pihak tertentu serta bebas dari benturan kepentingan, pengungkapan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan

## 2. Transparansi (X2)

Hal ini ditunjukkan melalui piagam komite audit (*audit committee charter*), program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang di dokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan (*disclosure*). Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang dipublikasikan kepada publik.

Pengukuran transparansi berpedoman dalam asmorjati (2016) Pengungkapan Informasi secara tepat waktu, memadai, dan akurat, kepada publik dan akses oleh stakeholders, Pengkomunikasian kebijakan kepada stakeholders, Penyampaian laporan Pelaksanaan GCG kepada stakeholders, Penyampaian informasi pelayanan kepada pelanggan dan pemeliharaan, kerahasiaan informasi

## 3. Akuntabilitas (X3)

Hal ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompetensi dan pengalaman dibidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional.

Penerapan akuntabilitas berpedoman dalam asmorjati (2016) penetapan tanggung jawab karyawan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan, mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan gcg, memiliki ukuran kinerja dan sistem reward and punishment, memegang prinsip gcg dan etika bisnis perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya.

## 4. Pertanggung jawaban (X4)

Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik, selain pada dewan komisaris.

prinsip pertanggung jawaban berpedoman pada dua poin dalam asmorjati (2016) berpegang pada prinsip kehati-hatian prudential practices dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, pelaksanaan tanggung jawab sosial

## 5. Kewajaran (X5)

prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil (*fair*) dan objektif terhadap semua pihak.

prinsip kewajaran, prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil (*fair*) dan objektif terhadap semua pihak. Berpedoman pada dua poin menurut asmorjati (2016) perlakuan setara kepada seluruh stakeholders, kesempatan yang sama bagi seluruh stakeholders untuk memberikan

masukannya yang bermanfaat bagi kepentingan perusahaan.

#### B. Variabel Terikat

Menurut Sugiyono (2013) "Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas". Variabel bebas di penelitian ini adalah kinerja perusahaan (Y).

Kinerja perusahaan menurut Binangkit (2014) kinerja yang baik merupakan aset bagi perusahaan sebaliknya, kinerja yang buruk adalah beban bagi perusahaan. Sebagai aset strategis dari perusahaan, kinerja memainkan peranan dalam mencapai keunggulan bersaing dan meningkatkan nilai usaha. Jika kinerja dianggap beban bagi perusahaan, maka tujuan perusahaan adalah mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari kinerja tersebut. Kinerja perusahaan merupakan hal yang dianggap penting bagi keberlangsungan perusahaan, kinerja dapat menjelaskan mengapa pelanggan lebih memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan daripada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing, yang membedakannya antara kegagalan atau kesuksesan. Semakin kredibel kelompok akreditasi, maka perusahaan akan semakin percaya diri untuk mempertahankan dirinya sendiri menghadapi klaim eksternal dan publikasi yang negatif, kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator : Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum, Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian, Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan

karyawan, Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka, Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

#### Pembahasan Hasil Penelitian

##### **H1 : Pengaruh Independensi terhadap kinerja perusahaan**

Berdasarkan uji hipotesis variabel independensi memperoleh nilai t hitung sebesar 2.439. Karena nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $2.439 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.005 \leq \alpha 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel pertanggung jawaban berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Hasil pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dian Margi Putra A (2016) yang menyatakan variabel independensi mempengaruhi variabel kinerja perusahaan dan perusahaan telah mampu menerapkan prinsip independensi sehingga diharapkan dapat menjaring responden yang berasal dari stakeholder di luar organ utama GCG yaitu pelanggan, rekanan, dan serikat karyawan, Hal ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan Rofina (2013) Prinsip independensi, yaitu Komite audit diharapkan bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota Komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan kepentingan.

##### **H2 : Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan uji hipotesis variabel Transparansi memperoleh t tabel sebesar 1,994. Berdasarkan data pada Tabel diatas, nilai t hitung sebesar 4.052. Karena nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $4.052 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.000 \leq \alpha 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel transparansi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

Hal ini ditunjukkan melalui piagam komite audit (*audit committee charter*), program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang di dokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kerjanya sebagai wujud pengungkapan (*disclosure*). Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang dipublikasikan kepada publik, Rofina (2013), sedangkan hasil penelitian yang Sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Dian Margi Putra A (2016) mengungkapkan bahwa transparansi pada perusahaan telah dilakukan dengan baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

### **H3 : Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan**

Berdasarkan uji hipotesis variabel Akuntabilitas memperoleh t tabel sebesar 1,994. Berdasarkan data pada Tabel diatas, nilai t hitung sebesar 2.121. Karena nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $2.121 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.004 \leq \alpha 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompetensi dan pengalaman dibidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional penerapan akuntabilitas Rofina (2013).

### **H4 : pertanggung jawaban berpengaruh terhadap kinerja perusahaan**

Berdasarkan uji hipotesis variabel pertanggung jawaban memperoleh t tabel sebesar 1,994. Berdasarkan data pada Tabel diatas, nilai t hitung sebesar 2.439. Karena nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $2.439 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.005 \leq \alpha 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel pertanggung jawaban berpengaruh

terhadap kinerja perusahaan. Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada publik, selain pada dewan komisaris dengan adanya teori yang mendasari, Rofina (2013).

### **H5 : Kewajaran berpengaruh terhadap kinerja perusahaan**

Berdasarkan uji hipotesis variabel kewajaran memperoleh t hitung sebesar 3.424. Karena nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $3,424 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.001 \leq \alpha 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel kewajaran berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil (*fair*) dan objektif terhadap semua pihak.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dari hipotesis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Independensi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena nilai t hitung sebesar 2.439, nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $2.439 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.005 \leq \alpha 0.05$ ), artinya variabel pertanggung jawaban berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hal ini terlihat pada pernyataan kepada pengguna jasa penerbangan yang menyatakan bahwa kegiatan penerbangan perusahaan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, pengelolaan perusahaan bebas dari pengaruh pihak lain sehingga perusahaan selalu mampu berinovasi dengan baik, perusahaan memperhatikan lingkungan sekitar sebagai wujud tanggung jawab sosial
2. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena nilai t hitung sebesar 4.052, nilai t hitung  $\geq$  t tabel ( $4.052 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.001 \leq \alpha 0.05$ ), artinya variabel kewajaran berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil (*fair*) dan objektif terhadap semua pihak.

$\geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.000 \leq \alpha 0.05$ ), artinya variabel transparansi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hal ini terlihat pada pernyataan kepada pengguna jasa penerbangan yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan manajemen perusahaan penerbangan dilakukan secara terbuka sehingga memudahkan saya untuk mengetahui perkembangan dunia penerbangan di indonesia, perusahaan penerbangan di indonesia menyampaikan informasi produk dengan jelas, pengaduan dari penumpang selalu dilayani dengan cukup efektif.

3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena nilai t hitung sebesar 2.121, nilai t hitung  $\geq t$  tabel ( $2.121 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.004 \leq \alpha 0.05$ ), artinya variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hal ini terlihat pada pernyataan kepada pengguna jasa penerbangan yang menyatakan bahwa penetapan tugas tanggung jawab karyawan dalam melayani penumpang sesuai visi, misi dan strategi perusahaan, saya selalu menggunakan layanan jasa penerbangan di indonesia karena fasilitas yang diberikan sesuai dengan keinginan pelanggan, tata cara pelayanan penumpang sesuai dengan kebutuhan penumpang
4. Pertanggung jawaban berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena nilai t hitung sebesar 2.439, nilai t hitung  $\geq t$  tabel ( $2.439 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.005 \leq \alpha 0.05$ ), artinya variabel pertanggung jawaban berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hal ini terlihat pada pernyataan kepada pengguna jasa penerbangan yang

menyatakan bahwa layanan jasa penerbangan di indonesia mematuhi setiap komitmen yang dipegang terutama pelayanan keamanan dan kenyamanan, perusahaan penerbangan di indonesia selalu mempunyai izin penerbangan sehingga saya merasa nyaman untuk selalu menggunakan fasilitas penerbangan, perusahaan selalu memberikan batas maksimum jumlah penumpang agar keselamatan penerbangan selalu terjaga, kewajaran berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hal ini terlihat pada pernyataan kepada pengguna jasa penerbangan yang menyatakan bahwa pengguna jasa penerbangan diberlakukan secara hormat melalui pelayanan yang berkualitas, kebutuhan informasi penumpang selalu dipenuhi secara cepat, informasi pribadi penumpang yang telah menggunakan jasa penerbangan bersifat penting sehingga perusahaan selalu menjaga dan memelihara data tentang informasi penumpang.

5. Kewajaran berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena nilai t hitung sebesar 3.424  $\geq t$  tabel ( $3,424 \geq 1,994$ ) dan nilai probabilitas signifikansi ( $0.001 \leq \alpha 0.05$ ), Artinya variabel kewajaran berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hal ini terlihat pada pernyataan kepada pengguna jasa penerbangan yang menyatakan bahwa Pengguna jasa penerbangan diberlakukan secara hormat melalui pelayanan yang berkualitas, Kebutuhan informasi penumpang selalu dipenuhi secara cepat, Informasi pribadi penumpang yang telah menggunakan jasa penerbangan bersifat penting sehingga perusahaan selalu menjaga dan memelihara data tentang informasi penumpang.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan penerbangan di surabaya
  - a. Untuk dapat merasakan manfaat dari good corporate governance, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mentaati peraturan saja tetapi lebih dari itu bagaimana perusahaan bisa mengaplikasikannya konsep-konsep *good corporate governance* kedalam operasional perusahaan sehari-hari. Hal tersebut harus dilakukan secara menyeluruh melalui pola kerja, sikap mentalitas dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di perusahaan. Karena terwujudnya *good corporate governance* akan sulit dicapai apabila moralitas dari para pihak yang berkepentingan terhadap jalannya perseroan tidak mendukung. Dengan demikian komitmen menerapkan *corporate governance* muncul bukan sekadar kepatuhan saja tetapi harus menjadi kebutuhan dan diaplikasikan sebagai suatu pelayanan yang baik kepada pelanggan atau pengguna jasa penerbangan
  - b. Perlunya untuk mensosialisasikan konsep *good corporate governance* guna memberikan suatu pemahaman akan pentingnya dari suatu tata kelola perusahaan yang baik demi kesinambungan usaha penerbangan. Dimana perusahaan penerbangan diharapkan dapat menerapkan konsep tata kelola Perusahaan yang baik.
2. Bagi penelitian selanjutnya
  - a. Bidang keuangan  
Dikarenakan pada penelitian ini menggunakan pengukuran

kinerja perusahaan non keuangan maka untuk penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti dapat menggunakan variabel kinerja perusahaan ditinjau berdasarkan pengukuran laporan keuangan agar dapat menambah pengetahuan perusahaan tentang Tata kelola perusahaan (*Good corporate goovernance*) apabila ditinjau dari kinerja perusahaan secara keuangan.

- b. Bidang penelitian  
Penelitian selanjutnya agar menambah variabel lain sehingga dapat diketahui faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan perlunya dilakukan penelitian ulang untuk mengetahui peningkatan kinerja perusahaan setelah memperbaiki pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Bagas Binangkit (2014) *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan Dan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*, Issn 2337- 568x Aktual Edisi Pebruari 2014. Vol 1. No.2. [Http://Journals.Ums.Ac.Id](http://Journals.Ums.Ac.Id) ,Diakses 28 Mei 2018.
- Adrian Sutedi. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri Veno (2015) *Pengaruh Good Corporate Governanceterhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufakturgo Public (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2011 Sampai 2013)*. Benefit Jurnal Manajemen Dan Bisnis Volume 19, [Http://Journals.Ums.Ac.Id](http://Journals.Ums.Ac.Id) ,Diakses 29 Mei 2018.

- Daniri, Mas Achmad. (2014). *Lead By Gcg*. Jakarta : Gagasan Bisnis Indonesia. Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung.
- Dian Margi Putra A (2016) *Yang Berjudul Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Pada PT Angkasa Pura II*, [Http://Digilib.Unila.Ac.Id](http://Digilib.Unila.Ac.Id). Diakses 27 Juni 2018.
- Gaspersz, Vincent. (2013). *Total Quality Management Untuk Praktisi Bisnis Dan Industri*. Bogor: Vinchristo Publication.
- Ghozali, Imam. (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lestari Dwi (2013). *Penganggaran Perusahaan: Teori Dan Aplikasi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Maria Rofina Wppw (2013) *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan perusahaan Di Bei*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 1 (2013), [Https://Core.Ac.Uk](https://Core.Ac.Uk) Diakses 30 Mei 2018.
- Maswar Patuh Priyadi, (2013) "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Bei" [Https://Repository.Stiesia.Ac.Id](https://Repository.Stiesia.Ac.Id), Diakses 26 Juni 2018.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2013), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yakub. (2012). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yowanda. (2017). *Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep, Permasalahan Dalam Aplikasinya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.